Journal of Education, Humaniora and Social Sciences (JEHSS) *ISSN 2622-3740 (Online)*
Vol 9, No. 2, November 2026: 655-667, DOI: 10.34007/jehss.v9i2.3243

Ancaman Demokrasi Digital di Indonesia: Analisis Deskriptif Berdasarkan Konsep Kerja Komunikatif Dialektis Hannah Arendt

Threats To Digital Democracy in Indonesia: Hannah Arendt's Dialectical Communicative Labor

Muhammad Rasyad Ghazali Saraan
Sekolah Tinggi Ilmu Komunikasi Pembangunan Medan, Indonesia

Diterima: 06 Oktober 2026; Direview: 22 Oktober 2026; Disetujui: 29 Oktober 2026: Dipublish: 23 November 2026

*Corresponding Email: mrasyadghazali@stikpmedan.ac.id

Abstrak

Penelitian ini menganalisis ancaman terhadap demokrasi digital di Indonesia melalui perspektif kerja komunikatif dialektis Hannah Arendt dan Ronald C. Arnett. Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif-analitis melalui studi literatur dan pengamatan terhadap dinamika komunikasi pada media sosial X/Twitter, Instagram, dan TikTok. Analisis diarahkan pada hubungan antara konsep the social, parvenu dan pariah, banality of evil, thoughtlessness, serta dialectical communicative labor dengan berbagai praktik komunikasi digital. Hasil penelitian menunjukkan bahwa media sosial tidak hanya memperluas ruang partisipasi politik, tetapi juga dapat mendorong tekanan konformitas, polarisasi, dan penyempitan ruang bagi perbedaan pendapat. Praktik cancel culture memperlihatkan kecenderungan penghakiman kolektif yang dapat berlangsung tanpa refleksi memadai, sedangkan aktivitas buzzer politik menunjukkan bagaimana komunikasi dapat mengalami komodifikasi dan digunakan untuk membentuk persepsi publik secara manipulatif. Di sisi lain, fenomena oversharing menunjukkan kaburnya batas antara ruang privat dan publik dalam komunikasi digital. Temuan tersebut menunjukkan bahwa ancaman demokrasi digital tidak semata-mata terletak pada teknologi, tetapi juga pada pola komunikasi yang kehilangan refleksi, pluralitas, dan dialog. Karena itu, dialectical communicative labor penting sebagai kerangka untuk membangun komunikasi digital yang lebih reflektif, plural, dan demokratis.

Kata Kunci: Hannah Arendt; Demokrasi Digital; Ruang Publik; Cancel Culture; Filsafat Komunikasi

Abstract

This study analyzes threats to digital democracy in Indonesia through the perspective of Hannah Arendt's and Ronald C. Arnett's concept of dialectical communicative labor. The study employs a qualitative approach with a descriptive-analytical method based on literature research and observation of communication dynamics on X/Twitter, Instagram, and TikTok. The analysis focuses on the relationship between the social, parvenu and pariah, banality of evil, thoughtlessness, and dialectical communicative labor and various forms of digital communication practices. The findings indicate that social media not only expands opportunities for political participation but can also generate pressures toward conformity, polarization, and the narrowing of space for differences of opinion. Cancel culture demonstrates tendencies toward collective judgment that may occur without sufficient reflection, while political buzzer activities illustrate how communication can become commodified and used to manipulate public perceptions. Meanwhile, oversharing reflects the blurring of boundaries between private and public spheres in digital communication. These findings indicate that threats to digital democracy do not lie solely in technology but also in communication practices that lose reflection, plurality, and dialogue. Therefore, dialectical communicative labor provides an important framework for developing more reflective, plural, and democratic digital communication.

Keywords: *Hannah Arendt; Digital Democracy; Public Sphere; Cancel Culture; Philosophy Of Communication*

How to Cite: Saraan, M.R.G. (2026), Ancaman Demokrasi Digital di Indonesia: Analisis Deskriptif Berdasarkan Konsep Kerja Komunikatif Dialektis Hannah Arendt, *Journal of Education, Humaniora and Social Sciences (JEHSS)*. 9 (2): 655-667.

This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0

PENDAHULUAN

Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi telah mengubah cara masyarakat berinteraksi, memperoleh informasi, dan berpartisipasi dalam kehidupan politik. Media sosial pada awalnya dipandang memiliki potensi besar untuk memperluas ruang partisipasi warga negara karena memungkinkan komunikasi berlangsung secara lebih terbuka, cepat, dan horizontal. Dalam konteks demokrasi, media sosial dapat menjadi ruang bagi masyarakat untuk menyampaikan pendapat, membangun komunitas, mengawasi kekuasaan, serta terlibat dalam diskursus politik tanpa sepenuhnya bergantung pada institusi media konvensional (Septiani, 2019). Perubahan tersebut menjadikan ruang digital sebagai salah satu arena penting dalam pembentukan opini publik dan praktik kewargaan kontemporer. Namun, perkembangan tersebut tidak secara otomatis menghasilkan ruang publik yang lebih deliberatif. Sejumlah penelitian menunjukkan bahwa media sosial juga dapat memperkuat fragmentasi, polarisasi, dan konflik politik melalui mekanisme seleksi informasi, *echo chamber*, dan *filter bubble* (Lim, 2017; Ali & Eriyanto, 2021).

Kondisi tersebut memiliki relevansi yang kuat dalam konteks demokrasi digital Indonesia. Penelitian Lim (2017) menunjukkan bahwa penggunaan media sosial dalam konteks politik Indonesia dapat memperkuat polarisasi berbasis identitas dan menciptakan ruang komunikasi yang terfragmentasi. Temuan Ali dan Eriyanto (2021) juga menunjukkan adanya hubungan antara polarisasi politik dan *selective exposure* pada pengguna media sosial di Indonesia. Pengguna cenderung berinteraksi dengan kelompok yang memiliki pilihan politik serupa dan mengonsumsi informasi yang sesuai dengan preferensi mereka. Kondisi tersebut menyebabkan ruang digital tidak selalu berfungsi sebagai arena perjumpaan berbagai perspektif, tetapi dapat berubah menjadi ruang yang memperkuat keyakinan kelompok sendiri dan mengurangi kemungkinan terjadinya dialog lintas pandangan. Dengan demikian, perluasan akses terhadap komunikasi digital tidak dengan sendirinya identik dengan peningkatan kualitas komunikasi demokratis.

Persoalan tersebut semakin kompleks dengan munculnya aktor-aktor komunikasi digital yang berupaya memengaruhi opini publik melalui produksi dan distribusi pesan secara terkoordinasi. Salah satu fenomena yang menonjol adalah keberadaan *buzzer* politik. Dalam konteks Indonesia, *buzzer* politik tidak hanya berfungsi sebagai penyebar pesan politik, tetapi juga dapat menjadi instrumen pembentukan opini, mobilisasi dukungan, dan polarisasi masyarakat. Penelitian Sihidi et al. (2025) menunjukkan bahwa aktivitas *buzzer* politik di Indonesia dan Thailand telah menciptakan ruang digital yang rentan terhadap provokasi, *black campaign*, kekerasan verbal, dan polarisasi. Kajian lain mengenai *buzzer* di Indonesia menunjukkan bahwa aktivitas tersebut dapat mengubah media sosial yang semestinya menjadi ruang partisipasi egaliter menjadi arena kompetisi narasi dan manipulasi opini publik. Dengan demikian, keberadaan *buzzer* perlu dipahami bukan hanya sebagai persoalan komunikasi politik, tetapi juga sebagai persoalan kualitas ruang publik digital.

Selain polarisasi dan *buzzer* politik, perkembangan ruang digital juga ditandai oleh munculnya *cancel culture*. Fenomena ini merupakan bentuk boikot atau pengucilan sosial yang dilakukan secara kolektif melalui media sosial terhadap individu, kelompok, atau institusi yang dianggap melanggar norma tertentu. Mardeson dan Mardesci (2022) menunjukkan bahwa *cancel culture* berkaitan dengan *mob mentality*, kurangnya informasi yang valid, serta tindakan kolektif yang dapat menimbulkan konsekuensi sosial dan pekerjaan bagi pihak yang menjadi sasaran. Dalam konteks komunikasi digital, fenomena tersebut memperlihatkan bagaimana penilaian publik dapat berubah menjadi penghakiman kolektif ketika pengguna media sosial bertindak berdasarkan arus opini dominan tanpa proses verifikasi dan refleksi yang memadai. Dengan demikian, *cancel culture* menjadi salah satu fenomena penting untuk memahami hubungan antara komunikasi massa digital, konformitas, dan kemampuan individu untuk mempertimbangkan perspektif pihak lain.

Di sisi lain, transformasi ruang digital juga memengaruhi batas antara kehidupan privat dan publik. Media sosial memungkinkan pengalaman personal, kehidupan keluarga, emosi, konflik, dan berbagai aspek kehidupan sehari-hari diproduksi menjadi konten yang dapat dikonsumsi oleh publik. Fenomena *oversharing* memperlihatkan kecenderungan individu untuk membagikan

This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0

informasi pribadi secara berlebihan demi memperoleh perhatian, pengakuan, simpati, popularitas, atau keuntungan ekonomi. Perubahan tersebut menunjukkan bahwa perkembangan media digital tidak hanya mengubah bentuk komunikasi publik, tetapi juga mengubah cara individu memahami dirinya sendiri dan batas-batas privasinya. Dengan kata lain, ruang digital menghasilkan persoalan baru mengenai bagaimana kehidupan privat dipertemukan, dipertontonkan, dan dinilai dalam ruang publik.

Persoalan mengenai perubahan batas publik dan privat tersebut memiliki relevansi dengan pemikiran Hannah Arendt. Dalam *The Human Condition*, Arendt membedakan ruang privat dan ruang publik sebagai dua ranah kehidupan manusia yang memiliki fungsi berbeda. Ruang publik berkaitan dengan tindakan, kebebasan, pluralitas, dan keberadaan manusia bersama orang lain, sedangkan ruang privat menyediakan kondisi bagi kehidupan personal dan pemenuhan kebutuhan kehidupan. Arendt juga menganalisis munculnya *the social*, yaitu suatu ranah yang mengaburkan batas antara privat dan publik serta mendorong ekspansi kepentingan sosial ke dalam ruang publik (Arendt, 1958). Dalam perkembangan masyarakat modern, perluasan *the social* dapat menyebabkan ruang publik kehilangan karakter politiknya dan semakin dipengaruhi oleh kebutuhan, kepentingan, produksi, konsumsi, dan tuntutan keseragaman.

Kerangka Arendt tersebut memperoleh relevansi baru ketika digunakan untuk membaca transformasi ruang publik digital. Longo (2024) menunjukkan bahwa teori ruang publik Arendt tetap relevan untuk memahami hubungan antara teknologi digital dan tindakan politik, meskipun teori tersebut dikembangkan sebelum hadirnya media digital. Menurut Longo, tantangan utama bukan sekadar menerapkan konsep Arendt secara langsung pada teknologi baru, tetapi memahami bagaimana teknologi turut membentuk kondisi kemungkinan bagi tindakan politik dan interaksi publik. Dalam konteks tersebut, media sosial dapat dipahami sebagai lingkungan komunikasi yang bukan hanya menjadi saluran bagi tindakan manusia, tetapi juga ikut membentuk cara pengguna melihat, menilai, dan merespons realitas sosial.

Perspektif tersebut menjadi semakin penting ketika dikaitkan dengan persoalan *thoughtlessness* dan *The Banality of Evil*. Pemikiran Arendt mengenai *banality of evil* tidak dimaksudkan untuk menyatakan bahwa kejahatan itu sendiri bersifat sepele, melainkan untuk menunjukkan bagaimana tindakan yang sangat destruktif dapat dilakukan oleh individu yang gagal melakukan refleksi dan penilaian secara mandiri. Dalam pembacaannya terhadap Adolf Eichmann, Arendt menyoroti ketidakmampuan untuk melihat persoalan dari sudut pandang orang lain sebagai bagian penting dari persoalan *thoughtlessness* (Arendt, 1963). Kajian mengenai pemikiran Arendt juga menegaskan bahwa aktivitas berpikir dan kemampuan menilai memiliki arti moral karena membantu individu mempertanyakan kebiasaan, norma, dan tekanan kolektif yang diterima begitu saja.

Konsep tersebut dapat digunakan secara kritis untuk membaca tindakan kolektif di media sosial. Ketika pengguna membagikan informasi tanpa verifikasi, melakukan serangan terhadap individu yang berbeda pandangan, mengikuti *cancel culture*, atau memperkuat narasi politik tertentu hanya karena sesuai dengan kelompoknya, terdapat kemungkinan terjadinya komunikasi yang kehilangan proses reflektif. Tindakan digital semacam itu tidak dapat secara sederhana disamakan dengan *banality of evil* dalam konteks historis yang dianalisis Arendt. Namun, konsep *thoughtlessness* dapat digunakan sebagai perangkat analitis untuk memahami bagaimana tekanan konformitas, pengulangan pesan, dan orientasi pada respons massa dapat mengurangi ruang bagi penilaian kritis dalam komunikasi digital. Dengan demikian, penggunaan konsep Arendt dalam artikel ini ditempatkan sebagai analogi dan kerangka filosofis, bukan sebagai penyamaan langsung antara kekerasan digital dan kejahatan totalitarian.

Dalam kerangka filsafat komunikasi, interpretasi Ronald C. Arnett memberikan pengembangan yang penting terhadap pemikiran Arendt. Arnett (2007) melalui konsep *Dialectical Communicative Labor* menempatkan komunikasi sebagai proses yang membutuhkan refleksi, ketegangan dialektis, dan keberanian untuk menghadirkan diri secara otentik dalam ruang publik. Komunikasi yang dialektis tidak berhenti pada pencarian persetujuan atau keseragaman, tetapi memungkinkan individu mempertahankan jarak kritis terhadap tekanan sosial dan mengembangkan kemampuan untuk melihat persoalan melalui perspektif yang berbeda. Konsep

This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0

ini menjadi penting untuk membedakan komunikasi yang memungkinkan tindakan dan refleksi dari komunikasi yang bersifat terasing (*Alienated Communicative Work*), yaitu komunikasi yang lebih berorientasi pada validasi, citra diri, dan tuntutan sistem sosial (Arnett, 2007).

Dalam lingkungan media sosial, konsep tersebut dapat digunakan untuk memahami kecenderungan individu membentuk identitas berdasarkan tuntutan popularitas dan validasi digital. Jumlah *likes*, *followers*, *views*, komentar, dan bentuk keterlibatan lainnya dapat menjadi indikator sosial yang mendorong individu untuk menyesuaikan dirinya dengan ekspektasi audiens. Dalam kondisi demikian, komunikasi dapat berubah menjadi proses produksi citra diri yang terus menerus. Individu tidak lagi hanya menyampaikan siapa dirinya, tetapi juga mengonstruksi dirinya berdasarkan apa yang dianggap dapat diterima oleh kelompok sosial dan algoritma platform. Perubahan tersebut memiliki keterkaitan dengan konsep *parvenu* dalam pemikiran Arendt, yakni figur yang memperoleh penerimaan sosial dengan menyesuaikan diri terhadap kelompok dominan, sedangkan mereka yang mempertahankan perbedaan dapat mengalami posisi sebagai *pariah* atau pihak yang dimarginalkan.

Fenomena algoritma media sosial semakin memperkuat persoalan tersebut. Algoritma platform memiliki kemampuan untuk menentukan jenis konten yang memperoleh visibilitas dan keterlibatan tinggi. Collins et al. (2020) menunjukkan bahwa algoritma media sosial memiliki konsekuensi terhadap kualitas komunikasi kewargaan dan perlu dipertimbangkan dalam kaitannya dengan kesehatan ruang publik demokratis. Dalam konteks Indonesia, penelitian mengenai polarisasi politik juga menunjukkan bahwa penggunaan media sosial, *selective exposure*, dan mekanisme *filter bubble* dapat memperkuat pengelompokan pengguna berdasarkan preferensi politik tertentu (Ali & Eriyanto, 2021). Temuan-temuan tersebut memperlihatkan bahwa ruang digital tidak sepenuhnya netral, karena struktur teknologi dan pola interaksi pengguna secara bersama-sama dapat memengaruhi visibilitas informasi dan kemungkinan terjadinya perjumpaan antarperspektif.

Meskipun penelitian mengenai demokrasi digital, polarisasi media sosial, *buzzer* politik, dan *cancel culture* di Indonesia telah berkembang, kajian yang mengintegrasikan fenomena tersebut dengan pemikiran Hannah Arendt melalui perspektif filsafat komunikasi masih terbatas. Sebagian penelitian lebih banyak menempatkan persoalan tersebut dalam perspektif politik, hukum, literasi digital, atau komunikasi politik, sedangkan dimensi filosofis mengenai hubungan antara ruang publik dan privat, konformitas, kemampuan berpikir, keotentikan, dan tanggung jawab komunikasi belum memperoleh perhatian yang memadai. Bahkan, kajian tentang Arendt dan ruang publik digital menunjukkan adanya kebutuhan untuk mengembangkan kembali pemikiran Arendt agar mampu menjelaskan perubahan kondisi tindakan politik yang dimediasi teknologi (Longo, 2024).

Berdasarkan kesenjangan tersebut, artikel ini menempatkan pemikiran Hannah Arendt dan interpretasi Ronald C. Arnett sebagai kerangka filosofis untuk menganalisis ancaman terhadap demokrasi digital di Indonesia. Analisis difokuskan pada tiga fenomena komunikasi digital, yaitu *buzzer* politik, *cancel culture*, dan *oversharing*. Ketiga fenomena tersebut dipilih karena merepresentasikan tiga persoalan yang saling berkaitan, yaitu pembentukan dan manipulasi opini publik, tekanan konformitas dan penghakiman kolektif, serta kaburnya batas antara ruang privat dan ruang publik. Ketiganya selanjutnya dianalisis melalui konsep *The Social*, *thoughtlessness*, *pariah*, *parvenu*, *The Banality of Evil*, dan *Dialectical Communicative Labor*.

Dengan demikian, penelitian ini bertujuan menganalisis bagaimana pemikiran Hannah Arendt, khususnya melalui interpretasi Ronald C. Arnett, dapat menjelaskan perubahan karakter ruang publik digital dan ancaman terhadap komunikasi demokratis di Indonesia. Pertanyaan penelitian yang diajukan adalah: **bagaimana konsep *The Social*, *The Banality of Evil*, dan *Dialectical Communicative Labor* dapat digunakan untuk menjelaskan ancaman terhadap ruang publik digital di Indonesia serta memberikan perspektif bagi penguatan komunikasi demokratis?** Artikel ini diharapkan memberikan kontribusi teoretis bagi pengembangan kajian filsafat komunikasi dan sosiologi media dengan menunjukkan bahwa persoalan demokrasi digital tidak hanya berkaitan dengan teknologi, regulasi, dan perilaku bermedia, tetapi juga dengan

This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0

kemampuan manusia untuk berpikir, menilai, mempertahankan pluralitas, dan bertindak secara bertanggung jawab dalam ruang publik.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan studi kasus deskriptif-analitis. Pendekatan kualitatif digunakan karena penelitian diarahkan untuk memahami, menginterpretasikan, dan memaknai fenomena komunikasi digital dalam konteks sosial tertentu, bukan untuk mengukur hubungan antarvariabel secara kuantitatif. Dalam penelitian kualitatif, perhatian utama diarahkan pada makna, konteks, pengalaman, serta proses sosial yang melatarbelakangi suatu fenomena (Creswell & Poth, 2018). Pendekatan studi kasus digunakan untuk memperoleh pemahaman yang mendalam mengenai fenomena demokrasi digital di Indonesia melalui pembacaan terhadap dinamika komunikasi yang berlangsung pada ruang media sosial.

Data penelitian bersumber dari kajian literatur (*library research*) dan observasi terhadap dinamika komunikasi pada media sosial di Indonesia, khususnya pada platform X (Twitter), Instagram, dan TikTok. Kajian literatur digunakan untuk menelusuri dan menginterpretasikan gagasan-gagasan teoritis yang berkaitan dengan Hannah Arendt, filsafat komunikasi, ruang publik, pluralitas, tindakan, pemikiran kritis, serta etika komunikasi. Dalam konteks penelitian ini, karya Arendt mengenai kondisi manusia, ruang publik dan privat, serta aktivitas manusia menjadi landasan konseptual utama (Arendt, 1958). Pemikiran Arendt mengenai *banality of evil* dan keterkaitannya dengan persoalan *thoughtlessness* juga digunakan secara terbatas sebagai kerangka interpretatif untuk memahami kemungkinan munculnya tindakan komunikasi yang kehilangan refleksi kritis (Arendt, 1963).

Sumber teoritis penting lainnya adalah pemikiran Ronald C. Arnett mengenai Hannah Arendt dalam *Perspectives on Philosophy of Communication*. Arnett (2007) membahas konsep *Dialectical Communicative Labor* sebagai perspektif komunikasi yang menempatkan proses komunikasi dalam hubungan dialektis dengan pengalaman manusia, perbedaan, refleksi, dan tanggung jawab komunikatif. Buku yang diedit oleh Pat Arneson tersebut secara khusus memuat bab "Hannah Arendt: Dialectical Communicative Labor" karya Ronald C. Arnett (Arneson, 2007). Dengan demikian, pemikiran Arnett digunakan dalam penelitian ini bukan sebagai teori komunikasi digital yang bersifat teknis, melainkan sebagai kerangka filosofis untuk membaca kualitas komunikasi, proses refleksi, dan hubungan dengan keberadaan orang lain dalam ruang publik.

Observasi diarahkan pada dinamika komunikasi yang berkembang dalam ruang media sosial, terutama fenomena *cancel culture*, buzzer politik, dan *oversharing*. Pengamatan tidak dimaksudkan untuk menghitung frekuensi unggahan atau melakukan pengukuran statistik, melainkan untuk mengidentifikasi pola komunikasi, bentuk respons terhadap perbedaan pendapat, kecenderungan konformitas, pembentukan opini, serta batas antara ekspresi publik dan kehidupan privat. Pemilihan fenomena tersebut didasarkan pada relevansinya dengan persoalan komunikasi dalam ruang publik digital, terutama ketika teknologi komunikasi memungkinkan produksi, penyebaran, dan pengulangan pesan secara cepat serta mempertemukan individu dengan berbagai pandangan yang berbeda.

Proses analisis dilakukan melalui tiga tahap. Pertama, penelitian melakukan abstraksi terhadap konsep-konsep utama yang relevan dari pemikiran Arendt dan Arnett, meliputi *the social*, *pariah*, *parvenu*, *thoughtlessness*, *banality of evil*, *Alienated Communicative Work*, dan *Dialectical Communicative Labor*. Abstraksi dilakukan untuk memperoleh kategori konseptual yang dapat digunakan dalam membaca fenomena komunikasi digital. Dalam kerangka Arendt, persoalan mengenai ruang publik, pluralitas, tindakan, dan munculnya *the social* menjadi penting untuk memahami bagaimana kehidupan bersama dapat dibentuk dan dipengaruhi oleh pola-pola komunikasi tertentu (Arendt, 1958).

Kedua, penelitian mengidentifikasi dan mengategorikan fenomena komunikasi digital di Indonesia yang memiliki keterkaitan dengan kategori konseptual tersebut. Fenomena *cancel culture* dibaca sebagai salah satu bentuk komunikasi kolektif yang dapat memperlihatkan ketegangan antara kebebasan berekspresi, tekanan konformitas, dan penghakiman terhadap

This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0

pihak lain. Buzzer politik dipahami sebagai fenomena komunikasi yang berkaitan dengan produksi dan distribusi pesan politik dalam ruang digital, sedangkan *oversharing* digunakan untuk melihat perubahan batas antara ruang privat dan ruang publik. Ketiga fenomena tersebut tidak diposisikan sebagai bentuk langsung dari konsep Arendt, tetapi sebagai objek empiris yang dianalisis melalui perspektif filosofis Arendt dan Arnett.

Ketiga, penelitian melakukan sintesis dan analisis kritis melalui proses kontekstualisasi antara konsep filosofis dengan fenomena komunikasi digital yang diamati. Pada tahap ini, konsep *Alienated Communicative Work* digunakan untuk membaca kecenderungan komunikasi yang kehilangan dimensi reflektif dan dialogis, sedangkan *Dialectical Communicative Labor* digunakan untuk memahami kemungkinan komunikasi yang membuka ruang bagi perbedaan, refleksi, tanggung jawab, dan pengakuan terhadap keberadaan pihak lain (Arnett, 2007). Analisis tersebut diarahkan untuk menjelaskan bagaimana praktik komunikasi digital dapat memperkuat atau justru menghambat kualitas ruang publik demokratis.

Penggunaan konsep *banality of evil* dalam penelitian ini dilakukan secara hati-hati. Penelitian tidak menyamakan *cancel culture*, buzzer politik, atau bentuk komunikasi agresif di media sosial dengan kejahatan totalitarian yang menjadi konteks pemikiran Arendt. Konsep tersebut digunakan secara terbatas untuk membantu menjelaskan persoalan *thoughtlessness*, yaitu kecenderungan bertindak atau berkomunikasi tanpa refleksi yang memadai terhadap konsekuensi tindakan dan posisi orang lain. Arendt sendiri menempatkan persoalan *thoughtlessness* dalam pembahasannya mengenai Eichmann dan *banality of evil*, sehingga konsep tersebut perlu ditempatkan dalam konteks filosofisnya dan tidak digunakan sebagai label moral langsung terhadap pelaku komunikasi digital (Arendt, 1963).

Dengan demikian, metode penelitian ini menempatkan fenomena komunikasi digital sebagai objek kajian yang dibaca melalui dialog antara data empiris dan pemikiran filosofis. Proses analisis tidak diarahkan untuk menghasilkan generalisasi statistik, tetapi untuk menghasilkan pemahaman interpretatif mengenai hubungan antara komunikasi, refleksi, pluralitas, dan kualitas kehidupan demokratis dalam ruang digital Indonesia. Kerangka tersebut memungkinkan penelitian melihat persoalan demokrasi digital tidak semata-mata sebagai persoalan teknologi dan penyebaran informasi, tetapi juga sebagai persoalan komunikasi, etika, tanggung jawab, dan kemampuan manusia untuk mempertahankan ruang bersama melalui proses berpikir dan berdialog.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Penelitian ini menunjukkan bahwa persoalan demokrasi digital di Indonesia tidak hanya berkaitan dengan perkembangan teknologi komunikasi, tetapi juga dengan perubahan cara individu membangun identitas, berinteraksi, menyampaikan pendapat, dan merespons perbedaan di ruang publik digital. Media sosial telah memperluas kesempatan masyarakat untuk berpartisipasi dalam diskursus publik, tetapi pada saat yang sama juga menciptakan kondisi komunikasi yang dapat memperkuat konformitas, polarisasi, tekanan sosial, dan penyebaran informasi yang tidak terverifikasi. Penelitian mengenai media sosial dalam konteks politik Indonesia menunjukkan bahwa algoritma rekomendasi, *filter bubble*, dan *echo chamber* dapat mempersempit paparan pengguna terhadap perspektif yang berbeda dan memperkuat polarisasi politik (Manuputty et al., 2025). Dengan demikian, ruang digital tidak selalu menghasilkan deliberasi yang lebih terbuka; dalam kondisi tertentu, ruang tersebut justru dapat menjadi lingkungan komunikasi yang mendorong pengulangan narasi yang sama.

Dalam perspektif Hannah Arendt, kondisi tersebut dapat dibaca melalui konsep *the social*, yaitu suatu kondisi ketika batas antara kehidupan privat dan publik semakin kabur dan perilaku sosial yang seragam memperoleh tekanan yang semakin kuat. Arendt (1958) membedakan antara ruang publik sebagai ruang kemunculan manusia melalui tindakan dan perkataan dengan ranah sosial yang cenderung mengatur perilaku manusia berdasarkan norma dan kebutuhan kolektif. Dalam konteks media sosial, konsep tersebut menjadi relevan karena platform digital bukan hanya menyediakan ruang bagi individu untuk berbicara, tetapi juga menciptakan mekanisme visibilitas yang menentukan konten mana yang memperoleh perhatian, pengulangan, dan legitimasi sosial.

This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0

Kajian kontemporer mengenai Arendt dan media sosial juga menunjukkan bahwa konsep *the social* dapat digunakan untuk membaca persoalan konformitas dalam komunikasi digital, terutama ketika popularitas dan pengulangan pesan menjadi ukuran dominan dalam ruang komunikasi (Sharpe & Reames, 2026).

Media Sosial sebagai Manifestasi *The Social* yang Menekan Pluralitas

Hasil analisis menunjukkan bahwa media sosial dapat dipahami sebagai ruang yang ambivalen. Di satu sisi, media sosial memberikan peluang kepada individu untuk menyampaikan pendapat, membangun komunitas, melakukan advokasi, dan berpartisipasi dalam kehidupan publik. Di sisi lain, struktur algoritmik dan mekanisme popularitas dapat mendorong pengguna untuk menyesuaikan diri dengan pola komunikasi yang sedang memperoleh perhatian terbesar. Dalam konteks ini, *the social* tidak dipahami sebagai algoritma itu sendiri, tetapi sebagai kondisi sosial yang diperkuat oleh sistem digital: individu semakin terdorong untuk mengikuti norma, selera, bahasa, dan opini yang memperoleh legitimasi dari mayoritas atau dari metrik popularitas.

Penelitian mengenai komunikasi politik digital di Indonesia menunjukkan bahwa algoritma rekomendasi mempersonalisasi konten yang diterima pengguna, sedangkan kecenderungan pengguna memilih informasi yang sesuai dengan keyakinannya dapat membentuk *filter bubble* dan *echo chamber*. Kondisi tersebut berpotensi memperkuat propaganda serta polarisasi politik, khususnya dalam konteks Pemilu 2024 (Manuputty et al., 2025). Temuan tersebut memperlihatkan bahwa persoalan demokrasi digital tidak semata-mata terletak pada keberadaan teknologi, tetapi pada hubungan timbal balik antara desain teknologi, perilaku pengguna, dan struktur sosial yang terbentuk di dalamnya.

Dari perspektif Arendt (1958), persoalan tersebut berkaitan dengan hilangnya ruang bagi pluralitas ketika individu semakin tunduk pada norma perilaku yang seragam. Bagi Arendt, kehidupan politik tidak didasarkan pada keseragaman, tetapi pada kenyataan bahwa manusia hadir sebagai individu-individu yang berbeda. Karena itu, ruang publik yang demokratis membutuhkan kemampuan untuk tampil, berbicara, dan bertindak di hadapan orang lain tanpa harus terlebih dahulu menghapus perbedaan. Jika media sosial justru memberi insentif kepada pengguna untuk mengikuti pendapat yang dominan, maka pluralitas dapat berubah menjadi konformitas.

Fenomena *cancel culture* memperlihatkan persoalan tersebut secara lebih konkret. Dalam masyarakat digital Indonesia, *cancel culture* dapat berfungsi sebagai mekanisme kontrol sosial ketika masyarakat menuntut pertanggungjawaban atas tindakan yang dianggap melanggar norma. Namun, mekanisme tersebut juga dapat berubah menjadi penghukuman kolektif ketika tuduhan tidak diverifikasi, kritik bergeser menjadi serangan personal, dan tidak tersedia ruang yang memadai bagi klarifikasi. Kajian mengenai *cancel culture* di Indonesia menunjukkan bahwa praktik tersebut memiliki sifat ambivalen: dapat menjadi bentuk partisipasi dan kontrol sosial, tetapi juga dapat menghasilkan eksklusi sosial, perundungan, dan kekerasan simbolik (Berkat, 2025; Prasetyo et al., 2025).

Dalam kerangka ini, konsep *thoughtlessness* Arendt (1963) menjadi relevan, tetapi harus digunakan secara hati-hati. *Thoughtlessness* tidak berarti bahwa setiap pengguna media sosial yang melakukan *canceling* merupakan pelaku kejahatan. Konsep tersebut lebih tepat digunakan untuk menjelaskan kemungkinan hilangnya aktivitas reflektif sebelum seseorang melakukan tindakan komunikasi. Ketika seseorang menyebarkan tuduhan, melakukan *retweet*, memberikan komentar penghukuman, atau mengikuti seruan boikot tanpa memeriksa konteks dan kebenaran informasi, tindakan tersebut memperlihatkan problem komunikasi yang tidak didahului oleh refleksi kritis.

Dengan demikian, fenomena yang dapat disebut sebagai "banalitas komunikasi digital" tidak dimaknai sebagai persamaan langsung antara *cancel culture* dan *banality of evil*. Yang menjadi perhatian adalah mekanisme yang memungkinkan tindakan yang berpotensi merugikan orang lain dilakukan oleh banyak individu biasa melalui tindakan komunikasi yang tampak sederhana. Setiap individu mungkin hanya memberikan satu komentar, satu *share*, atau satu unggahan, tetapi akumulasi tindakan tersebut dapat menghasilkan konsekuensi sosial yang besar. Penelitian

This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0

mengenai *cancel culture* di ruang digital Indonesia juga memperlihatkan bahwa viralitas, konsolidasi opini publik, dan penghukuman sosial dapat berlangsung secara kolektif melalui media sosial (Al Haq et al., 2026).

Di sinilah konsep *enlarged mentality* menjadi penting. Kemampuan melihat suatu persoalan dari perspektif orang lain merupakan syarat penting bagi komunikasi demokratis karena mencegah individu menjadikan perspektif sendiri sebagai satu-satunya ukuran kebenaran. Dalam ruang digital yang didominasi oleh kecepatan, viralitas, dan respons emosional, kemampuan tersebut dapat melemah apabila pengguna lebih tertarik pada kemenangan argumentatif daripada pemahaman. Demokrasi digital dengan demikian membutuhkan bukan hanya kebebasan berbicara, tetapi juga kemampuan untuk menunda reaksi, memeriksa informasi, mempertimbangkan perspektif lain, dan menerima kemungkinan bahwa pandangan sendiri dapat keliru.

Sindrom *Parvenu* dan Distorsi Identitas melalui *Alienated Communicative Work*

Hasil penelitian berikutnya menunjukkan adanya kecenderungan pengguna media sosial membentuk identitas berdasarkan tuntutan visibilitas dan penerimaan sosial. Identitas digital tidak selalu dibangun berdasarkan pengalaman autentik individu, tetapi dapat diproduksi melalui proses penyesuaian terhadap standar yang dianggap menarik, populer, atau memperoleh legitimasi algoritmik. Fenomena tersebut dapat terlihat dalam praktik *personal branding*, budaya produktivitas, gaya hidup yang dipamerkan, tren *healing*, konten estetis, serta ekspresi politik yang mengikuti kecenderungan kelompok tertentu.

Dalam konteks ini, konsep *parvenu* dalam pemikiran Arendt dapat digunakan sebagai metafora analitis untuk memahami individu yang berusaha memperoleh penerimaan melalui penyesuaian terhadap norma kelompok dominan. Arendt (1951) menggunakan konsep *parvenu* untuk menggambarkan individu yang berusaha memperoleh penerimaan dalam masyarakat melalui proses asimilasi, sedangkan figur *pariah* menunjuk pada posisi mereka yang berada di luar atau mengalami keterasingan dari kelompok dominan. Konsep tersebut penting untuk memahami bahwa penerimaan sosial dapat memiliki konsekuensi terhadap identitas ketika individu mengorbankan sebagian keunikan dirinya demi memperoleh legitimasi kelompok.

Dalam masyarakat digital, tekanan tersebut menjadi lebih kuat karena penerimaan dapat diukur secara kuantitatif melalui jumlah *likes*, *views*, komentar, pengikut, *shares*, dan berbagai indikator keterlibatan lainnya. Popularitas kemudian dapat berfungsi sebagai bentuk modal simbolik. Akibatnya, pengguna tidak hanya berkomunikasi untuk menyampaikan gagasan, tetapi juga untuk mempertahankan visibilitas. Kondisi tersebut dapat menghasilkan paradoks: semakin banyak seseorang berkomunikasi, semakin besar kemungkinan komunikasi tersebut kehilangan kedalaman reflektifnya.

Fenomena tersebut dapat dijelaskan melalui konsep *Alienated Communicative Work* yang digunakan dalam pembacaan Arnett terhadap pemikiran Arendt. Arnett (2007) menempatkan komunikasi sebagai persoalan filosofis yang berkaitan dengan bagaimana manusia berhubungan dengan perbedaan, pengalaman, dan dunia bersama. Dari perspektif ini, komunikasi menjadi terasing ketika aktivitas komunikasi kehilangan hubungan reflektifnya dengan pengalaman manusia dan berubah menjadi aktivitas instrumental yang terutama diarahkan pada pencapaian tujuan tertentu.

Dalam media sosial, bentuk keterasingan tersebut terlihat ketika pengguna memproduksi konten bukan terutama karena memiliki sesuatu yang penting untuk dikomunikasikan, melainkan karena sistem komunikasi digital menuntut produksi konten secara terus-menerus. Individu kemudian dapat mengalami situasi ketika dirinya harus "bekerja" untuk mempertahankan eksistensi digital. Foto, video, *caption*, komentar, dan opini diproduksi secara berulang untuk mempertahankan perhatian publik. Dalam kondisi demikian, komunikasi berubah menjadi bentuk kerja yang mengikuti logika metrik.

Fenomena tersebut tidak berarti bahwa seluruh aktivitas *content creation* merupakan bentuk keterasingan. Media sosial juga memungkinkan kreativitas, ekspresi diri, pemberdayaan ekonomi, dan pembentukan komunitas. Persoalan muncul ketika metrik digital menjadi satu-

This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0

satunya ukuran nilai komunikasi. Pada titik tersebut, individu berisiko menyesuaikan isi komunikasi dengan apa yang dianggap dapat menghasilkan perhatian, sekalipun isi tersebut tidak lagi merepresentasikan pengalaman atau keyakinannya sendiri.

Persoalan tersebut semakin kompleks dalam fenomena buzzer politik. Dalam konteks Indonesia, *political buzzers* umumnya dipahami sebagai aktor atau jaringan akun yang digunakan untuk memperkuat pesan politik tertentu, termasuk melalui akun anonim dan identitas yang tidak selalu transparan. ISEAS mencatat bahwa buzzer politik dapat digunakan untuk menyebarkan informasi yang menyesatkan dan memengaruhi opini publik, sekaligus berpotensi memperburuk polarisasi dan mengganggu kesetaraan politik karena aktor yang memiliki sumber daya finansial dapat membeli pengaruh komunikasi digital (Halimatusa'diyah & Adam, 2024).

Dengan demikian, buzzer politik dapat dibaca melalui perspektif *Alienated Communicative Work* ketika komunikasi dipisahkan dari tanggung jawab personal terhadap kebenaran dan kepentingan publik. Pesan diproduksi bukan karena komunikator meyakini atau mempertanggungjawabkannya secara personal, tetapi karena terdapat kepentingan ekonomi atau politik yang mengarahkan produksi pesan. Sastramidjaja et al. (2022) menunjukkan bahwa buzzer dalam politik Indonesia juga beroperasi sebagai aktor yang memanfaatkan ketidakpercayaan masyarakat terhadap sumber informasi arus utama dengan membentuk kesan sebagai penyedia informasi alternatif. Kondisi tersebut memperlihatkan bagaimana komunikasi dapat digunakan untuk memproduksi persepsi tentang realitas, bukan semata-mata untuk membuka ruang pencarian kebenaran.

Karena itu, persoalan buzzer politik tidak cukup dilihat sebagai masalah etika individu. Ia juga merupakan persoalan struktural mengenai bagaimana ekonomi politik digital memengaruhi produksi komunikasi. Ketika uang, algoritma, jaringan akun, dan popularitas menentukan pesan mana yang memperoleh visibilitas, ruang publik digital berpotensi mengalami distorsi. Demokrasi membutuhkan warga yang mampu membentuk penilaian politik secara bebas, sedangkan komunikasi yang diproduksi secara manipulatif dapat mengaburkan perbedaan antara opini organik dan opini yang sengaja direkayasa.

Hilangnya Batas Privat dan Publik: Patologi *Oversharing*

Dimensi lain yang ditemukan adalah semakin kaburnya batas antara ruang privat dan ruang publik. Bagi Arendt (1958), perbedaan antara privat dan publik memiliki arti penting karena kedua ranah tersebut menjalankan fungsi yang berbeda dalam kehidupan manusia. Ruang publik merupakan ruang kemunculan, tempat manusia memperlihatkan dirinya melalui perkataan dan tindakan, sedangkan ruang privat menyediakan kondisi yang memungkinkan manusia memenuhi kebutuhan dan mempertahankan kehidupan personal.

Perkembangan media sosial membuat kedua ruang tersebut semakin mudah beririsan. Individu dapat membawa pengalaman keluarga, hubungan personal, konflik domestik, aktivitas sehari-hari, bahkan pengalaman emosional ke dalam ruang yang dapat disaksikan oleh khalayak luas. Fenomena ini dikenal sebagai *oversharing*, yaitu kecenderungan membagikan informasi pribadi secara berlebihan. Dalam konteks Indonesia, lembaga pemerintah dan keamanan digital juga berulang kali mengingatkan bahwa *oversharing* dapat meningkatkan risiko kebocoran data, pencurian identitas, penipuan, dan penyalahgunaan informasi pribadi.

Namun, persoalan *oversharing* dalam penelitian ini tidak hanya dipahami sebagai masalah keamanan data. Dari perspektif Arendt, persoalan yang lebih mendasar adalah perubahan fungsi ruang privat. Ketika pengalaman privat terus-menerus diubah menjadi materi publik, kehidupan personal dapat kehilangan ruang perlindungan yang memungkinkan individu berhenti sejenak dari tuntutan penilaian sosial. Media sosial kemudian mengubah pengalaman pribadi menjadi komoditas perhatian.

Logika tersebut terlihat ketika kesedihan, konflik keluarga, hubungan personal, atau pengalaman traumatis dikemas menjadi konten yang dapat memperoleh *views*, *likes*, komentar, dan bahkan keuntungan ekonomi. Dalam konteks ini, pengalaman pribadi tidak lagi hanya memiliki nilai intrinsik bagi individu, tetapi juga memperoleh nilai berdasarkan kemampuan

This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0

menghasilkan perhatian publik. Hal tersebut memperlihatkan bagaimana logika ekonomi perhatian dapat masuk ke wilayah kehidupan personal.

Fenomena tersebut juga memiliki konsekuensi komunikatif. Ketika seseorang terbiasa mengukur pengalaman melalui respons publik, penilaian terhadap diri sendiri dapat semakin bergantung pada pengakuan eksternal. Antara kebutuhan untuk berbagi dan kebutuhan untuk memperoleh validasi menjadi sulit dibedakan. Padahal, ruang privat seharusnya memungkinkan manusia membangun refleksi dan identitas tanpa terus-menerus berada di bawah tatapan publik.

Dalam perspektif *Dialectical Communicative Labor*, persoalannya bukan terletak pada apakah individu boleh berbicara mengenai pengalaman personal atau tidak. Persoalan utamanya adalah apakah tindakan komunikasi tersebut masih membuka kemungkinan refleksi, tanggung jawab, dan hubungan yang bermakna dengan orang lain. Komunikasi dialektis tidak menuntut manusia menutup diri dari ruang publik, tetapi menuntut kesadaran mengenai apa yang layak dibawa ke ruang bersama dan bagaimana hal tersebut dikomunikasikan.

Dengan demikian, *oversharing* dapat dipahami sebagai salah satu bentuk patologi komunikasi ketika batas antara pengalaman pribadi dan kebutuhan akan perhatian publik semakin kabur. Perkembangan media digital memang tidak harus dipahami sebagai penghancur ruang privat secara otomatis. Namun, ketika seluruh pengalaman manusia diperlakukan sebagai konten, individu berisiko kehilangan kemampuan untuk membedakan antara pengalaman yang perlu dibagikan dan pengalaman yang perlu direnungkan secara personal.

Kerja Komunikatif Dialektis sebagai Jalan Pemulihan Demokrasi Digital dan Perlindungan Kaum *Pariah*

Meskipun pembacaan terhadap Arendt memperlihatkan sejumlah problem dalam modernitas dan kehidupan sosial, perspektif tersebut tidak harus berakhir pada pesimisme. Justru melalui konsep tindakan, pluralitas, perkataan, dan kemampuan berpikir, pemikiran Arendt memberikan dasar bagi upaya mempertahankan ruang publik yang demokratis (Arendt, 1958). Arnett (2007) mengembangkan dimensi tersebut melalui konsep *Dialectical Communicative Labor*, yang menempatkan komunikasi sebagai proses yang membutuhkan keterbukaan terhadap perbedaan dan kesediaan untuk terus melakukan refleksi terhadap pengalaman manusia.

Dalam konteks demokrasi digital Indonesia, kerja komunikatif dialektis berarti mengubah orientasi komunikasi dari sekadar memperoleh perhatian menuju pembentukan pemahaman. Komunikasi tidak hanya dinilai berdasarkan jumlah *likes*, *views*, atau *shares*, tetapi berdasarkan kemampuan membuka ruang dialog, mempertimbangkan perspektif berbeda, dan mempertanggungjawabkan pernyataan yang dibuat. Orientasi tersebut menjadi penting karena ruang digital Indonesia menghadapi tantangan berupa polarisasi, disinformasi, propaganda, dan manipulasi opini publik (Halimatusa'diyah & Adam, 2024; Manuputty et al., 2025).

Perspektif ini juga memberikan ruang bagi perlindungan terhadap kelompok yang berada dalam posisi *pariah*. Dalam pembacaan Arendt, figur *pariah* menunjukkan posisi individu atau kelompok yang tidak sepenuhnya diterima oleh struktur sosial dominan (Arendt, 1951). Dalam demokrasi digital, konsep tersebut dapat digunakan secara analitis untuk melihat bagaimana suara kelompok minoritas, kelompok marginal, komunitas lokal, atau pandangan yang tidak populer dapat tersisih ketika ruang digital terlalu didominasi oleh narasi mayoritas.

Karena itu, demokrasi digital tidak seharusnya hanya diukur dari banyaknya orang yang dapat berbicara. Demokrasi juga harus dinilai dari kemampuan ruang publik untuk mempertahankan keberagaman suara. Jika algoritma dan tekanan massa membuat individu dengan pandangan berbeda takut berbicara, maka kebebasan formal untuk berkomunikasi belum tentu menghasilkan pluralitas substantif.

Dalam konteks tersebut, "narasi kecil" memiliki arti penting. Cerita masyarakat lokal, pengalaman kelompok minoritas, perspektif mahasiswa, pengalaman kelompok rentan, serta kritik terhadap kebijakan publik merupakan bagian dari pluralitas yang perlu dipertahankan dalam ruang demokratis. Komunikasi dialektis tidak bertujuan menghapus perbedaan melalui konsensus yang dipaksakan, tetapi memungkinkan perbedaan hadir dan dipertukarkan secara bertanggung jawab.

This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0

Kerangka tersebut sekaligus memperlihatkan bahwa solusi terhadap patologi demokrasi digital bukanlah menolak media sosial. Media sosial tetap memiliki potensi besar sebagai ruang partisipasi politik, advokasi, pendidikan publik, dan mobilisasi sosial. Persoalannya adalah bagaimana pengguna dan institusi membangun budaya komunikasi yang tidak tunduk sepenuhnya pada logika viralitas. Penelitian mengenai aktivisme digital di Indonesia menunjukkan bahwa media sosial dapat menjadi sarana mobilisasi sekaligus dapat berinteraksi dengan bentuk-bentuk represi dan manipulasi digital (Pratamawaty, 2025). Oleh karena itu, penguatan demokrasi digital memerlukan kombinasi antara literasi digital, transparansi platform, tanggung jawab politik, dan kemampuan reflektif warga.

Dalam kerangka Arnett (2007), warga digital yang menjalankan *Dialectical Communicative Labor* bukanlah individu yang selalu benar atau selalu berhasil mencapai konsensus. Mereka justru adalah individu yang bersedia mempertahankan percakapan ketika perbedaan muncul. Mereka memeriksa informasi sebelum menyebarkannya, membedakan kritik terhadap tindakan dengan serangan terhadap pribadi, memberi ruang bagi klarifikasi, dan menyadari bahwa setiap tindakan komunikasi dapat memiliki konsekuensi terhadap orang lain.

Dengan demikian, "pahlawan komunikasi" dalam demokrasi digital tidak perlu dipahami sebagai figur heroik dalam pengertian tradisional. Istilah tersebut lebih tepat digunakan untuk menunjuk warga biasa yang mampu mempertahankan kapasitas berpikir dan bertindak secara bertanggung jawab di tengah tekanan konformitas digital. Mahasiswa, jurnalis, akademisi, aktivis masyarakat sipil, kreator konten, maupun pengguna media sosial biasa dapat menjalankan peran tersebut apabila mereka tidak menyerahkan seluruh proses penilaian kepada algoritma dan opini mayoritas.

Pada akhirnya, pembacaan Arendt dan Arnett menunjukkan bahwa ancaman demokrasi digital bukan hanya terletak pada teknologi, melainkan pada kemungkinan manusia kehilangan kemampuan untuk berpikir, berbeda, berdialog, dan bertindak secara bertanggung jawab. *The Social* menjelaskan kecenderungan konformitas; *thoughtlessness* membantu membaca bahaya tindakan tanpa refleksi; *parvenu* dan *pariah* membantu memahami persoalan penerimaan dan eksklusi sosial; sedangkan *Alienated Communicative Work* dan *Dialectical Communicative Labor* menyediakan kerangka untuk membedakan komunikasi yang terasing dari komunikasi yang reflektif dan dialogis. Dengan demikian, demokrasi digital yang sehat membutuhkan lebih dari sekadar akses terhadap teknologi. Ia membutuhkan warga yang mampu menggunakan teknologi tanpa kehilangan kapasitas untuk berpikir, mempertimbangkan perbedaan, dan mempertanggungjawabkan tindakan komunikatifnya.

SIMPULAN

Penelitian ini menunjukkan bahwa perkembangan demokrasi digital di Indonesia menghadirkan paradoks antara perluasan partisipasi publik dan munculnya berbagai patologi komunikasi. Media sosial memang membuka ruang yang lebih luas bagi masyarakat untuk berbicara, membangun identitas, menyampaikan kritik, dan berpartisipasi dalam diskursus publik. Namun, logika algoritmik, orientasi pada viralitas, tekanan konformitas, serta ekonomi perhatian dapat menyebabkan ruang digital berkembang menjadi lingkungan komunikasi yang membatasi pluralitas dan memperlemah refleksi kritis. Dalam perspektif Hannah Arendt, kondisi tersebut dapat dipahami melalui konsep *the social*, ketika individu semakin terdorong mengikuti norma dan perilaku yang dominan dalam kelompok.

Fenomena *cancel culture*, buzzer politik, dan *oversharing* memperlihatkan bentuk-bentuk berbeda dari persoalan tersebut. *Cancel culture* menunjukkan bagaimana tekanan kolektif dapat berubah dari kontrol sosial menjadi penghukuman dan eksklusi ketika tidak disertai verifikasi, dialog, dan ruang klarifikasi. Buzzer politik memperlihatkan kemungkinan terjadinya keterasingan komunikasi ketika produksi pesan lebih diarahkan oleh kepentingan ekonomi dan politik daripada tanggung jawab terhadap ruang publik. Sementara itu, *oversharing* menunjukkan semakin kaburnya batas antara ruang privat dan publik, sehingga pengalaman personal dapat berubah menjadi komoditas perhatian. Ketiga fenomena tersebut tidak dapat secara langsung disamakan dengan konsep *banality of evil*, tetapi dapat dibaca melalui persoalan *thoughtlessness*,

This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0

yaitu melemahnya kemampuan untuk berhenti, berpikir, mempertimbangkan perspektif orang lain, dan memperhitungkan konsekuensi tindakan komunikatif.

Pembacaan terhadap pemikiran Ronald C. Arnett mengenai *Dialectical Communicative Labor* memberikan perspektif alternatif terhadap persoalan tersebut. Komunikasi demokratis tidak cukup dipahami sebagai kebebasan untuk berbicara atau kemampuan memperoleh perhatian publik, tetapi juga sebagai proses yang menuntut refleksi, keterbukaan terhadap perbedaan, tanggung jawab, dan kesediaan mempertahankan dialog. Dalam kerangka ini, konsep *Alienated Communicative Work* membantu menjelaskan komunikasi yang terjebak dalam logika popularitas, algoritma, dan kepentingan instrumental, sedangkan *Dialectical Communicative Labor* menawarkan orientasi komunikasi yang lebih reflektif dan dialogis.

Dengan demikian, penguatan demokrasi digital Indonesia tidak cukup dilakukan melalui peningkatan akses teknologi, tetapi juga membutuhkan pembangunan budaya komunikasi yang mampu mempertahankan pluralitas dan kapasitas berpikir kritis. Perlindungan terhadap kelompok atau suara yang berada dalam posisi *pariah*, penguatan literasi digital, kehati-hatian dalam menyebarkan informasi, penghormatan terhadap batas privat dan publik, serta kesediaan menerima perbedaan merupakan bagian penting dari upaya tersebut. Demokrasi digital yang sehat pada akhirnya bukanlah ruang tanpa konflik atau ruang yang selalu menghasilkan konsensus, melainkan ruang yang memungkinkan perbedaan hadir, diperdebatkan secara bertanggung jawab, dan dipertahankan melalui komunikasi yang reflektif. Dalam konteks inilah *Dialectical Communicative Labor* dapat menjadi perspektif penting untuk mengembalikan komunikasi digital pada fungsi dasarnya sebagai sarana membangun dunia bersama, bukan sekadar sebagai instrumen memperoleh popularitas, legitimasi, atau keuntungan.

DAFTAR PUSTAKA

pengendalian sosial digital di era media sosial. *Jurnal Ilmiah Sosiologi, 5*(2). https://doi.org/10.20884/jis.v5i2.20073

Ali, D. J., & Eriyanto. (2021). Political polarization and selective exposure of social media users in Indonesia. *Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, 24*(3), 268–283. https://doi.org/10.22146/jsp.58199

Alnemr, N. (2026). Deliberative democracy in an algorithmic society: Harms, contestations and deliberative capacity in the digital public sphere. *Democratization, 33*(4), 927–946. https://doi.org/10.1080/13510347.2025.2522920

Arendt, H. (1951). *The origins of totalitarianism*. Harcourt, Brace and Company.

Arendt, H. (1958). *The human condition*. University of Chicago Press.

Arendt, H. (1963). *Eichmann in Jerusalem: A report on the banality of evil*. Viking Press.

Arneson, P. (Ed.). (2007). *Perspectives on philosophy of communication*. Purdue University Press.

Arnett, R. C. (2007). Hannah Arendt: Dialectical communicative labor. In P. Arneson (Ed.), *Perspectives on philosophy of communication* (pp. 67–84). Purdue University Press.

Berkat, A. (2025). Etika sosial dalam budaya *cancel culture*: Studi kritis atas tindakan kolektif di media sosial Indonesia. *Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, 1*(1).

Collins, B., Marichal, J., & Neve, R. (2020). The social media commons: Public sphere, agonism, and algorithmic obligation. *Journal of Information Technology & Politics, 17*(4), 409–425. https://doi.org/10.1080/19331681.2020.1742266

Creswell, J. W., & Poth, C. N. (2018). *Qualitative inquiry and research design: Choosing among five approaches* (4th ed.). SAGE Publications.

Halimatusa'diyah, I., & Adam, R. (2024). Political buzzer networks as threat to Indonesian democracy. *ISEAS Perspective, 2024*(66).

Lim, M. (2017). Freedom to hate: Social media, algorithmic enclaves, and the rise of tribal nationalism in Indonesia. *Critical Asian Studies, 49*(3), 411–427. https://doi.org/10.1080/14672715.2017.1341188

Longo, A. (2024). (Multi-)stabilities in the public sphere: Why Arendt needs postphenomenology. *Human Studies, 47*(3), 591–612. https://doi.org/10.1007/s10746-024-09716-7

Manuputty, C. R., Hanita, M., & Ritonga, R. (2025). Fenomena bias politik media sosial dalam polarisasi selama Pemilihan Umum Presiden 2024. *Warta Ikatan Sarjana Komunikasi Indonesia, 8*(1), 206–221. https://doi.org/10.25008/wartaiski.v8i1.371

Mardeson, E., & Mardesci, H. (2022). Fenomena boikot massal (*cancel culture*) di media sosial. *Jurnal Riset Indragiri, 1*(3), 174–181. https://doi.org/10.61069/juri.v1i3.27

This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0

Prasetyo, A. T., Andriana, V. A., & Wempi, J. A. (2025). Pergeseran makna *cancel culture* di Indonesia: Analisis semiotika sosial Theo van Leeuwen. *KOMUNIKATIF: Jurnal Ilmiah Komunikasi, 14*(1).

Pratamawaty, B. B. (2025). Social media activism and digital authoritarian drift in flawed democracies: The case of Indonesia. *Social Media + Society, 1*(3). https://doi.org/10.1177/29768640251383985

Sander, A. (2025). Social media, democracy, and the popular public sphere. *Constellations, 32*(2), 330–342. https://doi.org/10.1111/1467-8675.12773

Sastramidjaja, Y., Rasidi, P. P., & Elsitra, G. N. (2022). Peddling secrecy in a climate of distrust: Buzzers, rumours and implications for Indonesia's 2024 elections. *ISEAS Perspective, 2022*(85).

Septiani, D. (2019). Social media campaigns in Indonesia: How social media has transformed Indonesia's democratization process and political activity. *Journal of Digital Media & Policy, 10*(3), 329–343. https://doi.org/10.1386/jdmp_00006_1

Sharpe, J. O., & Reames, R. (2026). "We live in a society": Hannah Arendt, political speech, and social media. *Rhetoric Society Quarterly, 56*(4), 328–343. https://doi.org/10.1080/02773945.2026.2692664

Sihidi, I. T., Romadhan, A. A., Salahudin, S., & Widodo, E. R. P. (2025). Internet freedom and the impact of social media: Political buzzer behavior in Indonesia and Thailand. *Politika: Jurnal Ilmu Politik, 16*(1), 68–83. https://doi.org/10.14710/politika.16.1.2025.68-83

Tukan, P. B. (2022). Buzzer politik pembajak demokrasi. *Akademika, 20*(2), 39–56.

This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0